



PERAN SISTEM PERS INDONESIA DALAM PELIPUTAN BENCANA ACEH: ANALISIS KEHADIRAN NAJWA SHIHAB SEBAGAI JURNALIS PUBLIK

THE ROLE OF THE INDONESIAN PRESS SYSTEM IN COVERING THE ACEH DISASTER: AN ANALYSIS OF NAJWA SHIHAB'S PRESENCE AS A PUBLIC JOURNALIST

Akbar Miswari¹, Jihan Fanyra², Muhammad Saleh³

Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

Email: akbarmiswarihaji@gmail.com¹, jihanfanyra1220@gmail.com²,

muhammadsaleh@iainlhokseumawe.ac.id³

Article Info

Article history :

Received : 11-01-2026

Revised : 12-01-2026

Accepted : 14-01-2026

Published : 16-01-2026

Abstract

This study aims to analyze the role of the Indonesian Press System in covering the Aceh disaster by highlighting the presence of Najwa Shihab as a public journalist. The research focuses on how disaster journalism practices are implemented within the framework of responsible press freedom and sensitivity to the social and psychological conditions of affected communities. This study employs a qualitative descriptive approach through content analysis of news coverage, public statements and interviews, as well as a review of relevant scholarly literature in the fields of press studies and communication. The Indonesian Press System is used as a theoretical framework to examine the relationship between the media, the state, and the public in times of disaster. The findings reveal that Najwa Shihab's presence in reporting the Aceh disaster goes beyond the role of information dissemination, strengthening the press function as a mechanism of social control, public education, and an empathetic bridge between the state, the media, and disaster-affected communities. Such journalistic practices contribute to enhancing public awareness, empathy, and trust in the press during crisis situations.

Keywords: *Indonesian Press System, disaster journalism, Najwa Shihab*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Sistem Pers Indonesia dalam peliputan bencana Aceh dengan menyoroti kehadiran Najwa Shihab sebagai jurnalis publik. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana praktik jurnalisme bencana dijalankan dalam kerangka kebebasan pers yang bertanggung jawab serta sensitivitas terhadap kondisi sosial dan psikologis masyarakat terdampak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis konten pemberitaan, pernyataan dan wawancara publik, serta kajian terhadap literatur ilmiah yang relevan dengan studi pers dan komunikasi. Sistem Pers Indonesia digunakan sebagai kerangka teoritis untuk memahami relasi antara media, negara, dan publik dalam situasi krisis kebencanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran Najwa Shihab dalam peliputan bencana Aceh tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga memperkuat peran pers sebagai kontrol sosial, sarana edukasi publik, dan jembatan empatik antara negara, media, dan masyarakat terdampak bencana. Praktik jurnalistik yang menekankan empati, keberpihakan pada korban, serta akuntabilitas kebijakan publik dinilai mampu meningkatkan kesadaran sosial dan membangun kepercayaan publik terhadap peran pers dalam situasi bencana.

Kata kunci: *Sistem Pers Indonesia, jurnalisme bencana, Najwa Shihab*



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam. Kondisi geografis yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, yaitu Lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, menjadikan Indonesia rawan terhadap gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Selain itu, faktor iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi juga meningkatkan potensi terjadinya bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor. Dalam situasi tersebut, bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi, tetapi juga membawa dampak sosial, psikologis, dan kultural yang mendalam bagi masyarakat terdampak.

Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi bencana. Selain bencana tsunami 2004 yang menjadi tragedi kemanusiaan berskala global, Aceh juga kerap mengalami bencana alam lain seperti banjir, longsor, dan gempa bumi. Bencana-bencana tersebut tidak hanya menguji kapasitas pemerintah dalam penanganan darurat dan pemulihan, tetapi juga menguji peran berbagai aktor publik, termasuk media massa. Dalam konteks ini, kehadiran pers menjadi sangat penting sebagai penyedia informasi, pengawal kebijakan publik, serta sarana penyambung aspirasi masyarakat terdampak.

Selain faktor geografis dan iklim, tingginya risiko bencana di Indonesia juga berkaitan dengan persoalan tata kelola lingkungan dan pembangunan yang belum sepenuhnya berorientasi pada mitigasi risiko. Pembangunan infrastruktur yang kurang memperhatikan daya dukung lingkungan, alih fungsi lahan, serta lemahnya sistem peringatan dini turut memperbesar dampak bencana terhadap masyarakat. Dalam situasi ini, bencana tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai fenomena alam, melainkan sebagai persoalan struktural yang melibatkan kebijakan publik dan tata kelola negara.

Media massa memiliki peran penting dalam membingkai pemahaman publik terhadap bencana sebagai persoalan struktural tersebut. Cara media menyajikan informasi akan memengaruhi apakah bencana dipahami sebagai musibah yang tak terhindarkan atau sebagai peristiwa yang dapat diminimalkan dampaknya melalui kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, peliputan bencana menjadi arena penting bagi pers untuk menjalankan fungsi edukasi publik dan kontrol sosial secara simultan.

Dalam konteks demokrasi, pers berfungsi sebagai penghubung antara negara dan warga negara. Peliputan bencana membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui sejauh mana negara hadir dan bertanggung jawab dalam melindungi warganya. Ketika pers menjalankan fungsi ini secara optimal, media tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga menjadi instrumen demokrasi yang memungkinkan publik melakukan evaluasi terhadap kebijakan penanganan bencana.

Pers memiliki peran strategis dalam situasi kebencanaan karena berfungsi sebagai sumber utama informasi bagi masyarakat luas. Informasi yang disampaikan oleh media dapat memengaruhi cara publik memahami bencana, merespons situasi darurat, serta menilai kinerja pemerintah dan lembaga terkait. Oleh karena itu, kualitas peliputan bencana menjadi faktor krusial dalam membentuk persepsi publik. Peliputan yang akurat, berimbang, dan berperspektif kemanusiaan dapat membantu masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh, sementara peliputan yang



sensasional dan tidak sensitif berpotensi memperparah trauma korban dan menciptakan kepanikan.

Dalam konteks Indonesia, praktik jurnalistik tidak dapat dilepaskan dari Sistem Pers Indonesia yang berlandaskan pada prinsip kebebasan pers dan tanggung jawab sosial. Sistem Pers Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Fungsi-fungsi tersebut menempatkan pers sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan demokratis, termasuk dalam situasi krisis dan bencana.

Peliputan bencana menuntut pers untuk menjalankan kebebasan jurnalistik secara bertanggung jawab. Kebebasan pers memberikan ruang bagi media untuk mengungkap fakta di lapangan, menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik, serta mengangkat suara masyarakat terdampak. Namun, kebebasan tersebut juga harus diimbangi dengan komitmen etis agar pemberitaan tidak melanggar prinsip kemanusiaan, tidak mengeksploitasi penderitaan korban, serta tidak menimbulkan dampak psikologis lanjutan. Dalam hal ini, Sistem Pers Indonesia menjadi kerangka penting untuk memahami bagaimana pers seharusnya bekerja dalam situasi bencana.

Perkembangan teknologi informasi dan media digital turut memengaruhi pola peliputan bencana di Indonesia. Media digital memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas, namun juga menghadirkan tantangan berupa banjir informasi, penyebaran hoaks, dan narasi yang tidak terverifikasi. Kondisi ini menuntut peran jurnalis yang tidak hanya kompeten secara profesional, tetapi juga memiliki integritas, kepekaan sosial, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Jurnalis publik menjadi figur penting dalam menjaga kualitas diskursus publik di tengah derasnya arus informasi.

Najwa Shihab merupakan salah satu figur jurnalis publik yang memiliki pengaruh besar dalam ekosistem pers Indonesia. Melalui berbagai platform media, ia dikenal konsisten mengangkat isu-isu sosial, kemanusiaan, dan kebijakan publik dengan pendekatan kritis namun empatik. Dalam konteks peliputan bencana, kehadiran Najwa Shihab tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mediator antara masyarakat terdampak dan negara. Pendekatan jurnalistik yang digunakan cenderung menempatkan korban sebagai subjek, bukan sekadar objek pemberitaan.

Peliputan bencana Aceh yang melibatkan Najwa Shihab menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana praktik jurnalistik dijalankan dalam kerangka Sistem Pers Indonesia. Pemberitaan dan pernyataan publik yang disampaikan tidak hanya menyoroti peristiwa bencana itu sendiri, tetapi juga mengangkat aspek tanggung jawab negara, kebijakan penanganan bencana, serta kondisi sosial dan psikologis masyarakat terdampak. Hal ini menunjukkan peran pers sebagai kontrol sosial sekaligus sarana edukasi publik.

Kehadiran Najwa Shihab dalam peliputan pascabencana banjir Aceh dapat diasumsikan sebagai representasi fungsi ideal pers Indonesia dalam konteks bencana, yakni tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan peran kontrol, empati publik, dan advokasi kebijakan. Dalam wawancaranya dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Muallem), pers tidak berdiri sebagai pihak yang netral secara pasif, melainkan sebagai jurnalisme publik (*public journalism*) yang aktif menggali akuntabilitas negara terhadap penderitaan warga.



Dari sudut pandang sistem pers Indonesia, interaksi antara Najwa Shihab dan Mualem mencerminkan relasi dinamis antara media dan kekuasaan dalam situasi krisis. Najwa, sebagai figur jurnalis dengan legitimasi nasional, diasumsikan membawa “suara publik” ke hadapan pemimpin daerah. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak semata bersifat informatif, tetapi juga normatif menyentuh isu tanggung jawab negara, status bencana, serta kehadiran negara dalam pemulihan pascabencana. Hal ini menunjukkan bahwa pers berfungsi sebagai mediator antara korban bencana dan pengambil kebijakan.

Sementara itu, respons emosional Mualem dapat diasumsikan sebagai gambaran tekanan struktural yang dihadapi pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan terdesentralisasi. Dalam konteks ini, wawancara tersebut membuka ruang bagi publik untuk melihat bahwa kegagalan atau keterbatasan penanganan bencana tidak hanya persoalan individu pemimpin, tetapi juga berkaitan dengan mekanisme birokrasi, relasi pusat-daerah, dan kebijakan nasional tentang status bencana. Pers, melalui figur Najwa Shihab, berperan membongkar realitas ini agar dapat dipahami oleh publik luas.

Lebih jauh, kehadiran Najwa Shihab dapat diasumsikan memperkuat dimensi agenda-setting media dalam isu bencana Aceh. Dengan membawa isu lokal ke panggung nasional, media berkontribusi dalam meningkatkan perhatian publik dan tekanan moral terhadap negara. Dalam konteks ini, sistem pers Indonesia berfungsi sebagai pengungkit kepedulian nasional, yang berpotensi memengaruhi distribusi bantuan, respons pemerintah pusat, dan solidaritas sosial lintas daerah.

Dengan demikian, relasi antara Najwa Shihab dan Mualem dalam peliputan bencana Aceh dapat dianalisis sebagai contoh konkret bagaimana pers Indonesia menjalankan peran strategisnya: tidak hanya sebagai penyampai fakta, tetapi sebagai aktor demokratis yang menegosiasikan kepentingan publik, kekuasaan, dan kemanusiaan dalam situasi krisis.

Selain itu, kehadiran jurnalis publik dalam peliputan bencana juga berkontribusi dalam membangun empati kolektif. Media tidak hanya menyampaikan data dan fakta, tetapi juga membangun narasi yang mampu menggugah kesadaran sosial dan solidaritas masyarakat. Dalam konteks ini, pers berfungsi sebagai jembatan empatik yang menghubungkan negara, masyarakat luas, dan korban bencana. Fungsi ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab sosial pers yang menjadi bagian dari Sistem Pers Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam peran Sistem Pers Indonesia dalam peliputan bencana Aceh dengan menyoroti kehadiran Najwa Shihab sebagai jurnalis publik. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana praktik jurnalistik dijalankan dalam situasi kebencanaan, bagaimana nilai-nilai kebebasan pers dan tanggung jawab sosial diterapkan, serta bagaimana peran pers dalam membentuk kesadaran dan empati publik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi kajian komunikasi, jurnanisme, dan pers di Indonesia, khususnya dalam konteks peliputan bencana.

Kajian Teoritis

Kajian teoritis dalam penelitian ini berangkat dari pemahaman mengenai Sistem Pers Indonesia sebagai kerangka utama dalam menganalisis praktik peliputan bencana. Sistem Pers Indonesia merujuk pada keseluruhan prinsip, norma, lembaga, dan mekanisme yang mengatur kerja



pers dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem ini menempatkan pers sebagai lembaga sosial yang menjalankan fungsi informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta berperan sebagai pilar demokrasi. Dalam konteks tersebut, pers tidak hanya dipahami sebagai industri media, tetapi juga sebagai institusi publik yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap masyarakat.

Sistem Pers Indonesia berlandaskan pada prinsip kebebasan pers yang dijamin oleh undang-undang. Kebebasan pers dimaknai sebagai hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi tanpa intervensi kekuasaan. Namun, kebebasan ini tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan etika jurnalistik. Prinsip ini menjadi sangat relevan dalam peliputan bencana, karena situasi krisis menuntut pers untuk menjaga keseimbangan antara hak publik untuk mengetahui dan perlindungan terhadap korban bencana. Dalam kerangka sistem pers, kebebasan jurnalistik harus dijalankan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang merugikan masyarakat terdampak.

Teori tanggung jawab sosial pers menjadi bagian penting dalam Sistem Pers Indonesia. Teori ini menekankan bahwa pers memiliki kewajiban untuk melayani kepentingan publik dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermakna. Dalam konteks bencana, tanggung jawab sosial pers tercermin melalui pemberitaan yang mengedepankan nilai kemanusiaan, empati, serta kepentingan korban. Pers diharapkan tidak hanya menyoroti peristiwa bencana sebagai kejadian luar biasa, tetapi juga mengangkat aspek struktural seperti kesiapsiagaan, mitigasi, serta tanggung jawab negara dalam melindungi warga.

Peliputan bencana juga berkaitan erat dengan konsep jurnalisme bencana, yaitu praktik jurnalistik yang secara khusus menempatkan bencana sebagai isu kemanusiaan dan sosial. Jurnalisme bencana menuntut kepekaan etis, ketelitian informasi, dan kesadaran akan dampak pemberitaan terhadap korban. Dalam kajian ini, jurnalisme bencana dipahami sebagai bagian dari implementasi Sistem Pers Indonesia yang berorientasi pada kepentingan publik. Media tidak hanya melaporkan kerusakan dan korban, tetapi juga berperan dalam membangun kesadaran kolektif, solidaritas sosial, dan dukungan terhadap proses pemulihan.

Dalam kerangka Sistem Pers Indonesia, relasi antara pers dan negara bersifat dinamis. Pers tidak berada di bawah kontrol negara, namun juga tidak sepenuhnya terlepas dari struktur kekuasaan. Kebebasan pers dijamin secara hukum, tetapi pelaksanaannya menuntut tanggung jawab sosial agar informasi yang disampaikan tidak merugikan kepentingan publik. Dalam konteks bencana, relasi ini menjadi semakin kompleks karena negara memiliki kewenangan dalam penanganan darurat, sementara pers memiliki kewajiban untuk mengawasi penggunaan kewenangan tersebut.

Tanggung jawab sosial pers menuntut media untuk memperhatikan dampak pemberitaan terhadap masyarakat terdampak. Etika jurnalistik menegaskan bahwa korban bencana tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas berita. Oleh karena itu, jurnalisme bencana idealnya menghindari eksploitasi visual dan narasi dramatis yang berlebihan. Sebaliknya, media diharapkan mampu menyajikan informasi yang berorientasi pada pemulihan, pemberdayaan, dan perlindungan hak korban.



Selain itu, pers juga memiliki peran penting dalam membangun memori kolektif kebencanaan. Pemberitaan media tidak hanya berfungsi dalam jangka pendek, tetapi juga membentuk ingatan publik mengenai bencana dan respons negara. Ingatan kolektif ini berpengaruh terhadap kebijakan di masa depan, termasuk dalam hal mitigasi dan kesiapsiagaan. Dengan demikian, Sistem Pers Indonesia tidak hanya berfungsi dalam dimensi informatif, tetapi juga dalam dimensi historis dan normatif.

Konsep jurnalis publik menjadi relevan dalam kajian teoritis penelitian ini. Jurnalis publik dipahami sebagai figur jurnalistik yang tidak hanya menjalankan fungsi pelaporan, tetapi juga berperan aktif dalam membangun ruang dialog antara masyarakat dan negara. Jurnalis publik memanfaatkan kredibilitas dan pengaruhnya untuk menyuarakan kepentingan masyarakat, terutama kelompok rentan. Dalam Sistem Pers Indonesia, keberadaan jurnalis publik memperkuat fungsi pers sebagai kontrol sosial dan mediator komunikasi publik, khususnya dalam situasi krisis seperti bencana alam.

Kajian teoritis ini juga memandang pers sebagai aktor dalam pembentukan opini publik. Melalui proses framing dan konstruksi realitas sosial, media berperan dalam menentukan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Dalam peliputan bencana, framing yang digunakan media dapat memengaruhi cara publik memahami penyebab bencana, dampaknya, serta tanggung jawab pihak-pihak terkait. Sistem Pers Indonesia memberikan ruang bagi pers untuk melakukan framing secara independen, namun tetap menuntut akuntabilitas agar framing tersebut tidak menyesatkan atau merugikan kepentingan publik.

Dengan demikian, Sistem Pers Indonesia dalam kajian ini dipahami sebagai kerangka normatif dan operasional yang mengatur praktik jurnalistik dalam peliputan bencana. Sistem ini memungkinkan pers menjalankan kebebasan jurnalistik sekaligus menegaskan tanggung jawab sosial dan etika profesi. Melalui pendekatan teoritis ini, penelitian dapat menganalisis bagaimana peliputan bencana Aceh mencerminkan peran pers sebagai institusi demokratis yang berfungsi sebagai penyampai informasi, pengawas kekuasaan, pendidik publik, dan jembatan empatik antara negara dan masyarakat.

Dalam konteks kebencanaan, Sistem Pers Indonesia juga berkaitan dengan konsep komunikasi krisis (*crisis communication*), di mana media memiliki peran penting dalam mengelola arus informasi, mengurangi kepanikan publik, serta membangun kepercayaan terhadap institusi negara. Komunikasi krisis menuntut pers untuk tidak hanya menyampaikan informasi secara cepat, tetapi juga akurat dan konsisten agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Dalam situasi ini, peran pers sebagai penjaga kepentingan publik menjadi semakin krusial, karena kesalahan informasi dapat berdampak langsung pada keselamatan dan stabilitas sosial.

Selain itu, peliputan bencana juga berkaitan dengan etika jurnalisme trauma (*trauma-informed journalism*). Perspektif ini menekankan bahwa jurnalis harus memahami kondisi psikologis korban dan menghindari praktik peliputan yang berpotensi memperparah trauma. Dalam Sistem Pers Indonesia, etika jurnalistik berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengatur hubungan antara pers, korban, dan publik. Oleh karena itu, praktik jurnalisme bencana yang beretika tidak hanya mencerminkan profesionalisme jurnalis, tetapi juga menunjukkan keberpihakan pers pada nilai-nilai kemanusiaan.



Dengan demikian, kajian teoritis ini menempatkan Sistem Pers Indonesia sebagai kerangka multidimensional yang mencakup aspek hukum, etika, demokrasi, dan kemanusiaan. Kerangka ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap praktik peliputan bencana, khususnya dalam menilai sejauh mana pers mampu menjalankan kebebasan jurnalistik secara bertanggung jawab dalam situasi krisis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam peran Sistem Pers Indonesia dalam peliputan bencana Aceh dengan menyoroti kehadiran Najwa Shihab sebagai jurnalis publik. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada makna, konteks, serta dinamika praktik jurnalistik yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan perlu dianalisis melalui interpretasi terhadap teks, narasi, dan pesan komunikasi yang disampaikan media dalam situasi kebencanaan.

Objek penelitian ini adalah peliputan bencana Aceh yang dimuat dalam media massa dan media digital, khususnya konten jurnalistik yang melibatkan atau merepresentasikan peran Najwa Shihab. Data penelitian mencakup pemberitaan, liputan khusus, pernyataan publik, serta dokumentasi audiovisual yang berkaitan dengan bencana Aceh. Subjek penelitian dipahami bukan hanya sebagai individu jurnalis, melainkan sebagai representasi praktik jurnalistik dalam kerangka Sistem Pers Indonesia yang menempatkan pers sebagai institusi sosial dengan fungsi informasi, edukasi, dan kontrol sosial.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui analisis konten terhadap teks pemberitaan dan liputan yang relevan dengan fokus penelitian, termasuk narasi yang menekankan aspek kemanusiaan, tanggung jawab negara, serta keberpihakan pada masyarakat terdampak bencana. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen kebijakan pers, serta referensi akademik lain yang mendukung pemahaman teoritis dan konseptual mengenai Sistem Pers Indonesia dan jurnalisme bencana.

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis konten, studi dokumentasi, dan studi literatur. Analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi tema, pola narasi, dan framing pemberitaan yang muncul dalam peliputan bencana Aceh. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji arsip media dan materi audiovisual untuk memahami konteks serta konsistensi pesan jurnalistik. Sementara itu, studi literatur berfungsi sebagai dasar konseptual dalam mengaitkan temuan empiris dengan teori Sistem Pers Indonesia dan prinsip tanggung jawab sosial pers.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif-analitis.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan menginterpretasikan data berdasarkan kerangka teoritis yang digunakan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai jenis data dan referensi yang digunakan. Seluruh proses penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan etika akademik dan menggunakan data publik secara bertanggung jawab untuk kepentingan ilmiah.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peliputan bencana Aceh dalam kerangka Sistem Pers Indonesia tidak sekadar merepresentasikan peristiwa alam sebagai kejadian faktual, melainkan juga sebagai fenomena sosial yang melibatkan relasi kompleks antara negara, media, dan masyarakat. Dalam berbagai konten jurnalistik yang dianalisis, terlihat bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor yang membentuk wacana publik mengenai bencana, tanggung jawab pemerintah, dan posisi masyarakat terdampak. Praktik ini menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis dalam membangun pemahaman kolektif serta mengarahkan perhatian publik pada isu-isu kemanusiaan yang kerap terpinggirkan dalam situasi krisis.

Peliputan bencana Aceh yang melibatkan Najwa Shihab sebagai jurnalis publik memperlihatkan pendekatan jurnalistik yang menempatkan korban sebagai pusat narasi. Alih-alih menekankan sensasionalisme atau dramatika visual semata, liputan yang dianalisis cenderung mengangkat pengalaman, suara, dan kebutuhan masyarakat terdampak. Narasi yang dibangun berfokus pada kondisi sosial dan psikologis korban, termasuk kehilangan tempat tinggal, gangguan aktivitas ekonomi, serta trauma yang dialami kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan. Pendekatan ini menunjukkan praktik jurnalistik yang selaras dengan prinsip tanggung jawab sosial pers dalam Sistem Pers Indonesia, yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia.

Ekspresi emosional yang ditunjukkan Mualem saat diwawancarai Najwa Shihab memunculkan respons publik yang beragam, yang dapat diasumsikan sebagai bagian dari dinamika penerimaan masyarakat terhadap narasi media dalam situasi bencana. Di satu sisi, sebagian masyarakat memaknai tangis dan nada emosional Mualem sebagai ekspresi empati dan beban moral seorang pemimpin daerah yang berada di bawah tekanan besar. Dalam pembacaan ini, media berperan menghumanisasi figur kekuasaan, sehingga jarak psikologis antara pemimpin dan korban bencana menjadi lebih dekat.

Di sisi lain, muncul pula respons kritis dari sebagian publik yang menafsirkan ekspresi emosional tersebut sebagai simbol keterbatasan kepemimpinan struktural, atau bahkan sebagai distraksi dari tuntutan kebijakan yang lebih konkret. Perspektif ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya menerima emosi sebagai substitusi dari akuntabilitas, melainkan tetap menuntut tindakan nyata, kebijakan yang tegas, dan kehadiran negara yang efektif dalam penanganan bencana. Dalam konteks ini, media berfungsi sebagai ruang deliberasi publik yang mempertemukan simpati dan kritik secara bersamaan.

Respons yang terpolarisasi ini mengindikasikan bahwa sistem pers Indonesia, melalui figur jurnalis publik seperti Najwa Shihab, tidak hanya membentuk opini, tetapi juga memfasilitasi perdebatan sosial tentang standar kepemimpinan dalam krisis. Ekspresi emosional Mualem menjadi materi simbolik yang diproduksi dan direproduksi media, lalu ditafsirkan ulang oleh masyarakat melalui berbagai platform, terutama media sosial. Hal ini memperlihatkan bagaimana pers berperan dalam membentuk arena diskursus emosional dan rasional secara bersamaan.

Lebih jauh, reaksi masyarakat terhadap momen emosional tersebut dapat diasumsikan memperkuat fungsi reflektif pers, di mana publik diajak tidak hanya merasakan duka bencana, tetapi juga merenungkan relasi antara empati, kekuasaan, dan tanggung jawab negara. Dalam konteks peliputan bencana Aceh, sistem pers Indonesia tampak beroperasi tidak sekadar sebagai



penyampai informasi, tetapi sebagai produsen makna sosial, yang menentukan bagaimana emosi pemimpin dibaca: apakah sebagai tanda kepedulian, kelemahan struktural, atau panggilan untuk reformasi kebijakan.

Dengan demikian, respons masyarakat atas ekspresi emosional Mualem dalam wawancara tersebut memperkaya analisis tentang peran pers Indonesia. Media tidak hanya mengabarkan bencana, tetapi juga membentuk cara publik menilai kepemimpinan, empati, dan akuntabilitas dalam situasi krisis, menjadikan peliputan bencana sebagai ruang interaksi kompleks antara emosi, politik, dan kepentingan publik.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kehadiran jurnalis publik berkontribusi signifikan dalam memperkuat fungsi pers sebagai kontrol sosial. Melalui pertanyaan kritis dan penyajian fakta yang berimbang, peliputan bencana Aceh tidak hanya menyoroti dampak bencana, tetapi juga menilai respons pemerintah dan lembaga terkait. Kritik yang disampaikan tidak bersifat konfrontatif, melainkan konstruktif, dengan tujuan mendorong perbaikan kebijakan dan tata kelola penanganan bencana. Dalam konteks ini, pers berperan sebagai pengawas yang mengingatkan negara akan tanggung jawabnya terhadap keselamatan dan kesejahteraan warga.

Selain fungsi kontrol sosial, hasil penelitian memperlihatkan bahwa peliputan bencana juga menjalankan fungsi edukasi publik. Media menyampaikan informasi mengenai langkah-langkah mitigasi, proses evakuasi, serta pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Informasi tersebut disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan kontekstual, sehingga dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Dalam Sistem Pers Indonesia, fungsi edukasi ini menjadi bagian integral dari peran pers sebagai institusi sosial yang berkontribusi dalam peningkatan literasi publik, khususnya dalam isu kebencanaan.

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa praktik jurnalistik dalam peliputan bencana Aceh mencerminkan dinamika kebebasan pers yang bertanggung jawab. Kebebasan pers memungkinkan jurnalis untuk mengungkapkan fakta di lapangan dan menyuarakan kritik terhadap kebijakan publik. Namun, kebebasan tersebut dijalankan dengan tetap memperhatikan etika jurnalistik, seperti verifikasi informasi, perlindungan terhadap privasi korban, serta penghindaran narasi yang berpotensi memperparah trauma. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pers Indonesia menyediakan kerangka normatif yang memungkinkan pers menjalankan kebebasan sekaligus tanggung jawab sosial.

Di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat, hasil penelitian menunjukkan bahwa peliputan bencana Aceh juga menghadapi tantangan berupa kecepatan arus informasi dan potensi disinformasi. Media sosial dan platform digital memungkinkan informasi menyebar dengan cepat, namun sering kali tanpa proses verifikasi yang memadai. Dalam kondisi tersebut, kehadiran jurnalis publik dengan reputasi dan kredibilitas yang kuat menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas informasi. Najwa Shihab, melalui pendekatan jurnalistik yang reflektif dan berbasis data, berperan sebagai penyeimbang di tengah banjir informasi, sehingga publik memperoleh rujukan yang dapat dipercaya.

Lebih jauh, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan jurnalis publik dalam peliputan bencana Aceh turut membentuk standar normatif baru dalam praktik jurnalistik. Figur jurnalis publik dengan kredibilitas tinggi berfungsi sebagai rujukan etik bagi media lain, baik secara



langsung maupun tidak langsung. Ketika jurnalis publik menampilkan praktik peliputan yang empatik dan berorientasi pada kepentingan korban, hal tersebut berpotensi memengaruhi pola pemberitaan media lain dalam ekosistem pers nasional.

Peliputan bencana Aceh juga menunjukkan bahwa media memiliki peran penting dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat terdampak ke dalam ruang kebijakan. Melalui narasi jurnalistik, pengalaman korban diterjemahkan menjadi isu publik yang dapat dipahami oleh pengambil kebijakan. Dalam konteks ini, pers berfungsi sebagai penerjemah kepentingan sosial, yang menjembatani pengalaman individual korban dengan diskursus kebijakan nasional.

Selain itu, peliputan yang berkelanjutan pascabencana memperlihatkan bahwa pers tidak hanya hadir pada fase darurat, tetapi juga berperan dalam mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Keberlanjutan liputan ini penting untuk memastikan bahwa perhatian publik dan negara tidak berhenti setelah fase tanggap darurat berlalu. Dengan demikian, pers berkontribusi dalam menjaga akuntabilitas jangka panjang kebijakan penanganan bencana.

Pembahasan juga mengungkap bahwa peliputan bencana Aceh tidak dapat dilepaskan dari konteks historis dan kultural masyarakat setempat. Aceh memiliki pengalaman kolektif yang mendalam terkait bencana, sehingga media dituntut untuk memiliki sensitivitas budaya dalam menyampaikan informasi. Praktik jurnalistik yang memperhatikan nilai-nilai lokal dan kondisi psikologis masyarakat dinilai mampu mengurangi resistensi publik serta meningkatkan efektivitas komunikasi. Dalam hal ini, pers berfungsi sebagai jembatan antara realitas lokal dan perhatian nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasi empatik yang dibangun dalam peliputan bencana berkontribusi dalam membangun solidaritas sosial. Media tidak hanya menginformasikan kondisi di lapangan, tetapi juga mendorong partisipasi publik dalam bentuk bantuan, dukungan moral, dan advokasi kebijakan. Solidaritas yang terbangun melalui pemberitaan menunjukkan bahwa pers memiliki peran dalam menggerakkan kesadaran kolektif dan memperkuat kohesi sosial dalam situasi krisis.

Lebih lanjut, peliputan bencana Aceh juga menunjukkan bagaimana pers berperan dalam membentuk legitimasi kebijakan publik. Ketika media secara konsisten mengangkat isu penanganan bencana, pemerintah berada dalam tekanan moral dan politik untuk merespons tuntutan publik. Dalam konteks ini, pers tidak memaksakan kebijakan tertentu, tetapi menciptakan ruang diskursus yang memungkinkan publik terlibat dalam proses evaluasi kebijakan. Peran ini menjadi semakin penting ketika bencana tidak hanya berdampak pada satu wilayah, tetapi memiliki implikasi nasional. Peliputan yang berkelanjutan memungkinkan publik di luar wilayah terdampak untuk memahami situasi secara komprehensif dan berpartisipasi dalam solidaritas sosial. Dengan demikian, pers berfungsi sebagai penghubung antara pengalaman lokal dan kepentingan nasional.

Dalam perspektif jangka panjang, praktik jurnalistik yang empatik dan kritis dalam peliputan bencana berkontribusi pada penguatan budaya demokrasi. Pers tidak hanya hadir dalam momen krisis, tetapi juga mengawal proses pemulihan dan rekonstruksi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pers dalam Sistem Pers Indonesia bersifat berkelanjutan dan tidak berhenti pada momentum peristiwa semata.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa Sistem Pers



Indonesia memberikan ruang bagi praktik jurnalistik yang humanis, kritis, dan edukatif dalam peliputan bencana. Kehadiran Najwa Shihab sebagai jurnalis publik memperlihatkan bagaimana pers dapat menjalankan peran multidimensional, mulai dari penyampai informasi, pengawas kebijakan, pendidik publik, hingga penghubung empatik antara negara dan masyarakat terdampak. Praktik jurnalistik semacam ini dinilai mampu meningkatkan kualitas demokrasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pers, khususnya dalam konteks kebencanaan.

Analisis Penulis

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian teoritis yang telah diuraikan, penulis memandang bahwa peliputan bencana Aceh dalam kerangka Sistem Pers Indonesia menunjukkan dinamika yang cukup kompleks antara kebebasan pers, tanggung jawab sosial, dan tuntutan empati terhadap masyarakat terdampak. Pers berada pada posisi strategis sekaligus dilematis, karena di satu sisi dituntut untuk menyampaikan informasi secara cepat dan terbuka, sementara di sisi lain harus menjaga etika jurnalistik agar tidak mengeksploitasi penderitaan korban. Dalam konteks ini, peran jurnalis publik menjadi sangat penting sebagai penyeimbang antara kepentingan informasi dan nilai kemanusiaan.

Penulis menilai bahwa kehadiran Najwa Shihab dalam peliputan bencana Aceh merepresentasikan praktik jurnalistik yang relatif ideal dalam Sistem Pers Indonesia. Pendekatan yang digunakan tidak sekadar berorientasi pada peristiwa, tetapi juga pada makna sosial dan kemanusiaan di balik bencana. Narasi yang dibangun cenderung memberikan ruang bagi suara korban dan masyarakat terdampak, sekaligus menghadirkan kritik yang terukur terhadap kebijakan publik. Praktik ini menunjukkan bahwa pers dapat menjalankan fungsi kontrol sosial tanpa harus kehilangan sensitivitas dan empati.

Namun demikian, penulis juga melihat bahwa praktik jurnalistik semacam ini masih belum menjadi standar umum dalam peliputan bencana di Indonesia. Banyak media masih terjebak pada pola pemberitaan yang menekankan dramatisasi visual dan narasi sensasional demi menarik perhatian audiens. Pola tersebut berpotensi memperkuat trauma korban dan mengaburkan substansi persoalan, seperti lemahnya mitigasi bencana dan kurangnya kesiapsiagaan struktural. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa Sistem Pers Indonesia perlu terus diperkuat, tidak hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui penguatan etika dan profesionalisme jurnalis.

Penulis juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi pers di era media digital. Kecepatan arus informasi dan kompetisi antar media sering kali mendorong praktik jurnalisme instan yang mengorbankan verifikasi dan kedalaman analisis. Dalam situasi bencana, kondisi ini menjadi semakin problematis karena informasi yang tidak akurat dapat menimbulkan kepanikan dan kebingungan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, penulis berpandangan bahwa jurnalis publik dengan kredibilitas yang kuat memiliki peran penting sebagai rujukan informasi yang dapat dipercaya dan sebagai penyeimbang di tengah banjir informasi digital.

Lebih lanjut, penulis menilai bahwa peliputan bencana Aceh menunjukkan potensi besar pers dalam membangun empati kolektif dan solidaritas sosial. Media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk kesadaran publik mengenai penderitaan korban dan urgensi respons bersama. Dalam kerangka Sistem Pers Indonesia, fungsi ini sejalan dengan peran pers sebagai institusi sosial yang berkontribusi dalam memperkuat kohesi sosial dan nilai-nilai kemanusiaan.



Namun, potensi ini hanya dapat terwujud apabila pers secara konsisten mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan ekonomi dan politik.

Sebagai mahasiswa pascasarjana Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) sekaligus aktivis yang terlibat langsung dalam kerja-kerja kemanusiaan di wilayah terdampak banjir Aceh, penulis memandang bahwa terdapat kesenjangan serius antara realitas lapangan dan representasi media arus utama. Bencana yang dalam praktiknya berskala besar ditandai dengan meluasnya wilayah terdampak, lamanya genangan, lumpuhnya aktivitas sosial-ekonomi, serta penderitaan korban justru kerap tampil seolah sebagai peristiwa rutin dan tidak darurat dalam pemberitaan nasional.

Kekeliruan dalam peliputan ini bukan semata persoalan teknis jurnalistik, tetapi mencerminkan masalah struktural dalam sistem pers Indonesia, khususnya dalam membingkai bencana di wilayah pinggiran seperti Aceh dan sebagian wilayah Sumatera. Minimnya kedalaman liputan, lemahnya verifikasi berbasis lapangan, serta kecenderungan menormalisasi bencana telah berkontribusi pada penyempitan makna krisis, sehingga urgensi penanganan bencana tidak terbaca secara memadai oleh publik nasional maupun pengambil kebijakan.

Dalam konteks ini, sistem pers tidak dapat dilepaskan dari implikasi kebijakan, termasuk dalam proses penetapan status bencana nasional. Ketika media gagal menampilkan skala penderitaan dan kompleksitas dampak bencana secara proporsional, maka tekanan publik terhadap negara juga melemah. Akibatnya, bencana besar berpotensi tereduksi menjadi statistik sesaat, bukan krisis kemanusiaan yang menuntut intervensi nasional yang luar biasa.

Kehadiran Najwa Shihab sebagai jurnalis publik dalam peliputan pascabencana Aceh menjadi titik penting dalam analisis ini. Sebagai figur pers dengan otoritas simbolik dan jangkauan audiens yang luas, Najwa merepresentasikan potensi strategis media sebagai penggerak kesadaran kolektif dan advokasi kebijakan. Namun, dari sudut pandang penulis, potensi tersebut belum dimaksimalkan secara penuh untuk menggaungkan tuntutan penetapan bencana nasional, khususnya bagi Aceh dan wilayah Sumatera yang terdampak secara simultan.

Dalam kerangka jurnalisme publik, pers tidak hanya bertugas menyampaikan empati atau menampilkan sisi emosional pemimpin daerah, tetapi juga mengartikulasikan kepentingan korban bencana secara tegas dan berkelanjutan. Dengan pengaruh yang dimiliki Najwa Shihab dalam ekosistem media Indonesia, dorongan yang lebih kuat, konsisten, dan eksplisit terhadap urgensi status bencana nasional seharusnya dapat menjadi bagian dari agenda jurnalistik, bukan sekadar implikasi implisit dari wawancara emosional.

Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa suara korban sering kali kalah oleh narasi normatif media. Oleh karena itu, sistem pers idealnya berfungsi sebagai perpanjangan suara masyarakat terdampak, bukan hanya sebagai pengamat atau pencatat peristiwa. Dalam konteks peliputan bencana Aceh, kritik ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan kontribusi jurnalis publik, melainkan untuk menegaskan bahwa tanggung jawab moral pers meningkat seiring dengan besarnya pengaruh yang dimiliki.

Dengan demikian, analisis terhadap kehadiran Najwa Shihab dalam peliputan bencana Aceh membuka refleksi yang lebih luas tentang peran sistem pers Indonesia: apakah ia telah sepenuhnya berpihak pada kepentingan kemanusiaan, atau masih terjebak dalam pola pemberitaan yang menormalisasi krisis. Bagi penulis, pers seharusnya menjadi aktor utama dalam memastikan bahwa



bencana tidak dipersempit sebagai peristiwa biasa, melainkan dikenali sebagai darurat kemanusiaan yang menuntut tanggung jawab nasional.

Secara reflektif, penulis berpandangan bahwa penelitian ini menunjukkan pentingnya menjadikan jurnalisme bencana sebagai bagian integral dari pendidikan dan praktik jurnalistik di Indonesia. Penguatan kapasitas jurnalis dalam memahami konteks sosial, psikologis, dan kultural masyarakat terdampak menjadi kebutuhan mendesak. Dengan demikian, Sistem Pers Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif, tetapi juga sebagai landasan praksis yang mendorong lahirnya praktik jurnalistik yang humanis, kritis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi situasi kebencanaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pers Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam peliputan bencana, khususnya dalam konteks bencana Aceh. Pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi mengenai peristiwa kebencanaan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang membentuk kesadaran publik, mengawal tanggung jawab negara, serta memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Dalam situasi krisis, keberadaan pers yang independen dan bertanggung jawab menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas informasi dan stabilitas sosial.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran Najwa Shihab sebagai jurnalis publik memperkuat implementasi Sistem Pers Indonesia dalam praktik jurnalistik. Pendekatan peliputan yang menekankan empati, keberpihakan pada korban, serta kritik yang konstruktif terhadap kebijakan publik mencerminkan fungsi pers sebagai kontrol sosial dan sarana edukasi masyarakat. Praktik jurnalistik tersebut tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membangun narasi yang mampu meningkatkan kepedulian sosial dan mendorong solidaritas publik terhadap masyarakat terdampak bencana.

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa kebebasan pers dalam Sistem Pers Indonesia harus dijalankan seiring dengan tanggung jawab sosial. Peliputan bencana Aceh memperlihatkan bahwa kebebasan jurnalistik yang berlandaskan etika mampu menghasilkan pemberitaan yang informatif, berimbang, dan humanis. Pendekatan ini penting untuk menghindari eksploitasi penderitaan korban serta menjaga kepercayaan publik terhadap media, terutama di tengah tantangan arus informasi digital yang cepat dan berpotensi menimbulkan disinformasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa peliputan bencana Aceh melalui perspektif jurnalis publik menunjukkan peran pers sebagai jembatan empatik antara negara dan masyarakat. Sistem Pers Indonesia memberikan kerangka normatif yang memungkinkan pers menjalankan fungsi demokratisnya secara optimal, baik sebagai penyampai informasi, pengawas kebijakan, maupun penggerak kesadaran sosial. Oleh karena itu, penguatan praktik jurnalisme bencana yang berorientasi pada kemanusiaan dan tanggung jawab sosial menjadi penting untuk meningkatkan kualitas peran pers dalam menghadapi situasi kebencanaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Azmi, F., & Hidayat, D. (2021). Media framing in disaster reporting: A study of Indonesian online media. *Jurnal Komunikasi*, 13(2), 145–158.



- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2022). *Laporan penanganan bencana di Indonesia*. BNPB.
- Bennett, W. L., & Livingston, S. (2020). The disinformation order: Disruptive communication and the decline of democratic institutions. *European Journal of Communication*, 35(3), 213–231.
- Coombs, W. T. (2014). *Ongoing crisis communication: Planning, managing, and responding* (4th ed.). Sage Publications.
- Coombs, W. T. (2015). *Situational crisis communication theory*. Wiley Blackwell.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy* (14th ed.). Pearson Education.
- Eriyanto. (2021). *Analisis framing: Konstruksi, ideologi, dan politik media*. LKiS.
- Fachruddin, A. (2020). Etika jurnalistik dalam peliputan bencana alam. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(1), 1–15.
- Hanitzsch, T., & Vos, T. (2021). Journalism beyond democracy: A new look into journalistic roles. *Journalism*, 22(6), 1467–1483.
- Hanusch, F. (2020). Journalism and emotion: Toward a more integrated perspective. *Journalism Studies*, 21(1), 1–15.
- Haryanto, I., & Nugroho, Y. (2020). Journalism and disaster communication in Indonesia. *Asian Journal of Communication*, 30(5), 387–402.
- Hidayat, D., & Setiawan, A. (2023). Media credibility and public trust during disaster reporting. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 12(1), 33–49.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68.
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2021). *The elements of journalism*. Three Rivers Press.
- Kriyantono, R. (2020). *Teknik praktis riset komunikasi*. Kencana.
- McNair, B. (2017). *An introduction to political communication* (6th ed.). Routledge.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's mass communication theory* (6th ed.). Sage Publications.
- McQuail, D. (2020). *McQuail's media and mass communication theory* (7th ed.). Sage Publications.
- Nimmo, D., & Savage, R. L. (2011). *Candidates and their images: Concepts, methods, and findings*. Goodyear Publishing.
- Nugroho, Y., Putri, D. A., & Laksmi, S. (2021). Mapping media responsibility in Indonesian democracy. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(2), 97–111.
- Nurhadi, Z. F. (2022). Jurnalisme empatik dalam liputan bencana alam. *Jurnal Kajian Media*, 6(2), 89–104.
- Pantti, M., Wahl-Jorgensen, K., & Cottle, S. (2021). *Disasters and the media*. Peter Lang.
- Perdana, A., & Irwansyah. (2023). Digital journalism and disaster narratives in Indonesia. *Journal of Communication Inquiry*, 47(1), 67–84.
- Prihatin, R. B. (2021). Sistem pers nasional dan kebebasan pers di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 401–414.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.



- Purnomo, A., & Wahyuni, H. I. (2020). Media ethics in disaster reporting: Indonesian perspectives. *Journal of Asian Media Studies*, 5(1), 21–35.
- Rachmiate, A., & Romli, K. (2022). Media, public empathy, and disaster communication. *Jurnal Komunikasi Global*, 11(2), 133–148.
- Shoemaker, P. J., & Reese, S. D. (2021). *Mediating the message: Theories of influences on mass media content* (3rd ed.). Routledge.
- Siregar, A. (2020). Pers, demokrasi, dan tanggung jawab sosial. *Jurnal Dewan Pers*, 5(1), 1–14.
- Sukmono, F. G., & Junaedi, F. (2021). Jurnalisme bencana dan etika media. *Jurnal ASPIKOM*, 6(1), 23–38.
- Sumadiria, H. (2020). *Jurnalistik Indonesia: Menulis berita dan feature*. Simbiosis Rekatama Media.
- Susanto, E. H., & Prasetyo, B. (2024). Public journalism in Indonesian disaster coverage. *Media and Communication*, 12(1), 55–69.
- Tapsell, R. (2020). Media power in Indonesia: Oligarchs, citizens, and the digital revolution. *Journal of Contemporary Asia*, 50(2), 230–246.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Utami, P. (2023). Disaster communication and media responsibility. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 21(1), 61–75.
- Wahyuni, H. I., & Nurhadi, Z. F. (2022). Media narratives and public perception during disasters. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 25(2), 117–131.
- Wardhani, N. K. (2024). Empathy framing in disaster journalism. *Journal of Media Ethics*, 39(1), 14–29.
- Westlund, O., & Lewis, S. C. (2020). Journalistic norms in the digital age. *Digital Journalism*, 8(1), 1–17.
- Zelizer, B. (2022). *What journalism is (and what it could be)*. Polity Press.